

Analisis yuridis keabsahan perjanjian tukar menukar benda tidak bergerak antara pemerintah kota dan perusahaan Swasta: analisis putusan No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sby = Juridical analysis of the validity of immovable property exchange agreement between city government and private enterprise

Muhammad Farisi, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20512313&lokasi=lokal>

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perjanjian non-pertukaran objek bergerak dalam bentuk tanah berdasarkan Perjanjian Hukum, ketentuan Undang-Undang Pertanahan Hukum dan peraturan nasional dan terkait lainnya. Utama Permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah tentang keabsahan perjanjian Pertukaran benda tidak bergerak berupa tanah dalam Surat Keputusan No. 200/Pdt.G/2019/ PN.Sb. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian Jenis penelitian yuridis normatif adalah deskriptif analitik. Dari hasil Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pertukaran lahan dinyatakan legal secara hukum hukum jika memenuhi persyaratan perjanjian pertukaran tanah dan memenuhi persyaratan hukum perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah. Penulis tidak setuju dengan pertimbangan dari Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan bahwa perjanjian tukar menukar tanah telah dibuat dilakukan oleh para pihak adalah halal menurut hukum. Menurut penulis bursa Hak atas tanah yang dilakukan oleh para pihak menjadi tidak sah karena bursa saham dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk itu perbuatan hukum pengalihan hak atas tanah.

This study aims to analyze the non-exchange of object agreements moves in the form of land based on the Law Agreement, the provisions of the Land Law Other national and related laws and regulations. Main the problem in writing this thesis is about the validity of the agreement exchange of immovable objects in the form of land in Decree No. 200/Pdt.G/2019/PN.Sb. The writing of this article uses a research metho This type of juridical normative research is analytical descriptive. From the results Based on the research, it can be seen that land exchange is legally declared legal law if it meets the terms of the land swap agreement and meet the legal requirements of the legal act of transferring land rights. The author does not agree with the consideration of the District Court Judge Surabaya stating that land swap agreements have been made done by the parties is lawful according to law. According to the authors of the exchange Land rights exercised by the parties are invalid because of the stock exchange carried out by parties who do not have the authority to do so legal act of transferring land rights.